

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
ANAK TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B  
(Studi Kasus Tahun 2016-2018)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

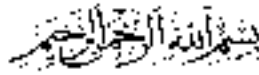
Oleh

**FITRIANI. HS**

NIM.10100115126

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FITRIANI. HS  
Nim : 10100115126  
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 01 Februari 1997  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak  
Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama  
Maros Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2016-2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2016-2018)” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 23 Juli 2019

Penyusun

**FITRIANI. HS**  
**Nim: 10100115126**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB (Studi Kasus tahun 2016-2018) , yang disusun oleh Fitriani. HS. NIM: 10100115126 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Juli 2019 M  
26 Zul-qaidah 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.  
Munaqisy I : Dr. Fatmawati, M.Ag.  
Munaqisy II : Dr. Rahma Amir, M.Ag.  
Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.  
Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini, M.H.I.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

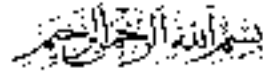
Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIM 10010161990031003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2016-2018)”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa ummat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam hal kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk, serta bantuan dari pihak yang lain akhirnya dapat disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendalipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai meterinya, bahasanya, serta sistematikanya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik itu secara moril maupun secara materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

3. Dr. H. Supardin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Dr. Hj. Fatimah, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Dr. H. Supardin, M.H.I., selaku pembimbing I dan Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Dr. Fatmawati, M.Ag., selaku Penguji I dan Dr. Rahma Amir, M.Ag., selaku penguji II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan kritikan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana;
8. Staf jurusan Peradilan Agama, Kak Sri yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan kuliah di UIN Alauddin Makassar;
9. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Maros yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Maros
10. Bapak Drs. Muh. Arief Musi, S.H. dan Irham Riad, S.H.I, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Maros yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan terkait penelitian penulis.
11. Kepada orang tua tercinta H. Safir dan Hj. Jahida yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

12. Kepada saudaraku Briptu H. Ahmad Safari dan Istrinya Nur Asmi Ainun Kamal, S.E. yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Kakak Dwi Utami Hidayah Nur, S.H.I., M.H., yang selalu memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Seluruh teman-teman di jurusan Peradilan Agama terkhusus kepada angkatan 2015 Kelas D yang telah memberikan banyak kesan selama penulis menempuh proses perkuliahan di UIN Alauddin Makassar;
15. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 60 UIN Alauddin Makassar Kecamatan Bulukumpa Kelurahan Jawi-Jawi yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya kecil ini merupakan sebuah karya sederhana yang masih banyak kekurangan, serta jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Makassar, 23 Juli 2019

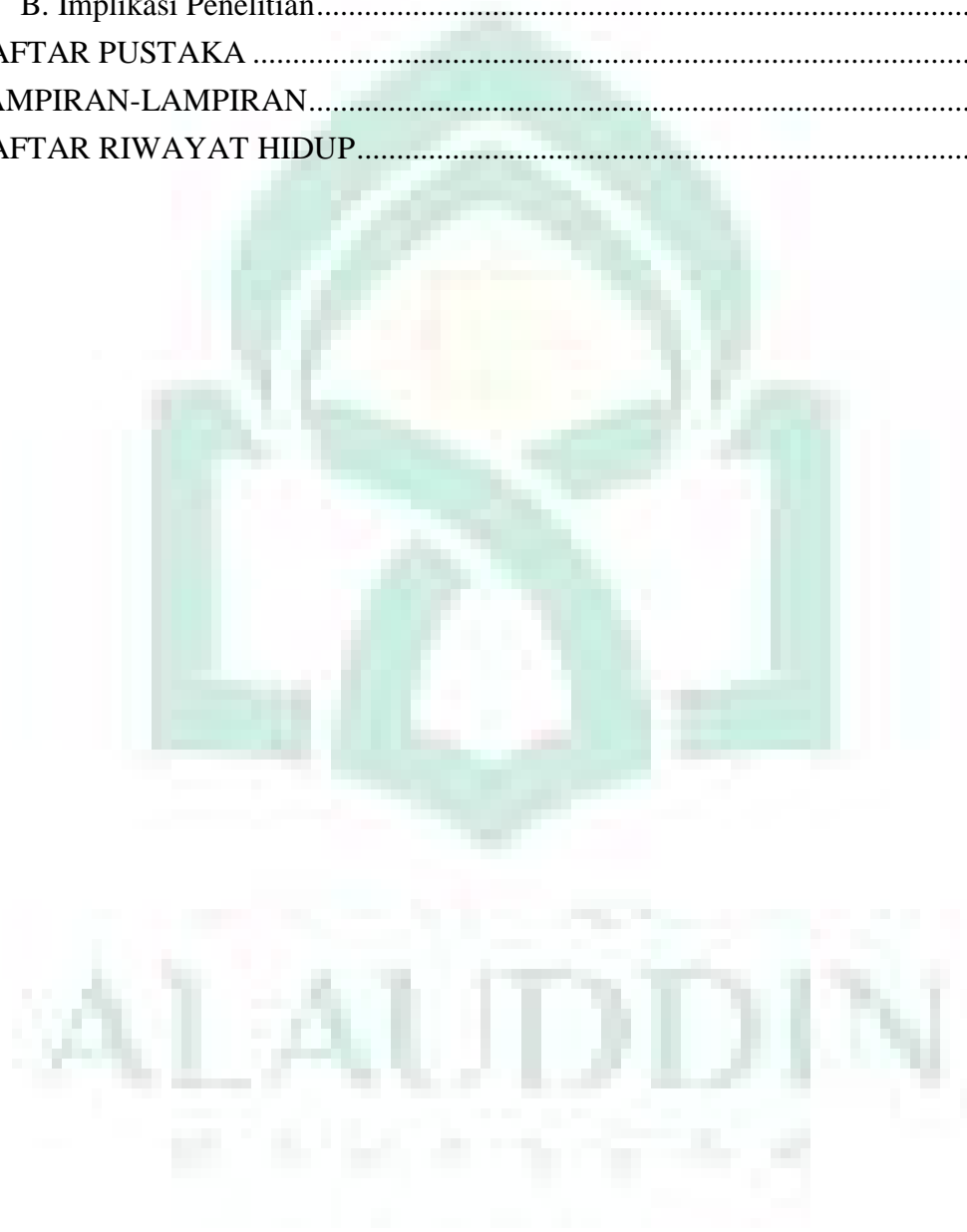
Penulis

**FITRIANI. HS**  
**NIM: 10100115126**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....	10
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	10
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	15
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah.....	18
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	18
2. Persyaratan Permohonan Dispensasi Nikah .....	19
3. Proses Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Metode Pengumpulan Data .....	25
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
<b>BAB IV PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros.....	28
B. Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018.....	37

C. Faktor-faktor Penilaian Hakim untuk Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.....	47
D. Penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros .....	50
<b>BAB VPENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75





## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros .....	37
Tabel 2: Perkara Dispensasi Nikah yang Diputus Pada Tahun 2016.....	40
Tabel 3: Perkara Dispensasi Nikah yang Diputus Pada Tahun 2017.....	41
Tabel 4: Perkara Dispensasi Nikah yang Diputus Pada Tahun 2018.....	42



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

قِيلَ : *qila*

رَمَى : *rama*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta' marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*  
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجَّيْنَا : *najjainah*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-biladu*

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

*Fil Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafaz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *Hum fi rahmatillah*

#### 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh:

*Syahrul ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

#### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

NAMA : FITRIANI. HS  
NIM : 10100115126  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN TERHADAP PERKARA  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
MAROS KELAS IB (STUDI KASUS TAHUN 2016-  
2018)

---

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dengan tujuan 1) Mengetahui perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018, 2) Mengetahui faktor-faktor penilaian hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah, 3) Mengetahui penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros.

Penelitian ini adalah penelitian *field research* kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Maros Kelas IB guna memperoleh data dan informasi tentang perkara dispensasi nikah serta dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui tentang perkara dispensasi nikah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i, pendekatan yuridis normal, dan pendekatan empiris.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018. Perkara dispensasi nikah yang masuk semuanya akan diperiksa, diadili, dan diputus perkaranya melalui sidang pengadilan. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Maros mayoritas dikabulkan oleh hakim. Sedangkan permohonan yang tidak dikabulkan persentasenya kecil. Adapun yang menjadi faktor penilaian hakim sehingga perkara dispensasi nikah tersebut dikabulkan dikarenakan adanya unsur darurat pada permohonan pemohon dispensasi nikah, seperti telah hamil. Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya unsur darurat pada permohonan pemohon dispensasi nikah maka Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pemohon. Meskipun demikian, penerapan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah belum efektif karena perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah hanya sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi sedangkan hak-hak yang lainnya dikesampingkan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya partisipasi masyarakat dalam meminimalisir jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, khususnya orang tua agar sering mengingatkan anak tentang ajaran agama dan mengawasinya dalam segala hal, baik lingkungan pergaulan sang anak maupun penggunaan media sosialnya agar anak tersebut tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan anak tersebut hamil dahulu sebelum menikah. serta diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dispensasi nikah dalam kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wath'i* dan *al-dammu wa al-tadahkul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath wa al'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi perkawinan akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailly bahwa perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wath'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>1</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan terdapat persyaratan berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita. Persyaratan tersebut mengenai batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

---

<sup>1</sup>Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, ED I (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2004), h. 38-42.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab I, pasal 1.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Pengaturan tentang usia ini pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dapat dicapai.<sup>3</sup>

Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19 tahun dan laki-laki adalah 23 tahun. Untuk ukuran ini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.<sup>4</sup>

Akan tetapi, kenyataannya penyimpangan terhadap batas umur yang telah ditentukan dapat dilakukan karena Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat memberikan pengecualiannya.<sup>5</sup> Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>6</sup>

Akibat dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu terbukti dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama. Terkhusus pada Pengadilan Agama Maros

---

<sup>3</sup>Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, h. 69.

<sup>4</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 203-204.

<sup>5</sup>Nginyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini* (Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 77.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab II, pasal 7 ayat (2).

Kelas IB dimana pengadilan tersebut menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dispensasi nikah pada tahun 2016-2018 sebanyak 98 perkara.<sup>7</sup>

Permohonan dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Maros disebabkan karena beberapa hal misalnya perempuan telah hamil diluar nikah, masalah ekonomi, aspek sosial, dan aspek keluarga.

Dispensasi perkawinan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena merupakan suatu cara untuk melegalkan pernikahan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Sehingga setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah hendaknya menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan dalam memutus permohonan dispensasi nikah agar hak anak tersebut tetap terjamin.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB (studi kasus tahun 2016-2018).

---

<sup>7</sup>Website Pengadilan Agama Maros, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Maros*. <http://sipp.pa-maros.go.id> (25 Juni 2018).

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1 ayat (1).

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian atau ruang lingkup penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan atau cakupan penelitian, baik dari segi rentang waktu maupun jangkauan wilayah objek penelitian.<sup>9</sup> Oleh karena itu, fokus penelitian pada skripsi ini adalah:

- a. Efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak
- b. Perlindungan anak
- c. Dispensasi nikah
- d. Pengadilan Agama
- e. Studi kasus

### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran dalam menginterpretasikan judul yang diajukan dalam skripsi ini, maka peneliti akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu:

- a. Efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak

Efektivitas adalah suatu indikator yang menunjukkan keberhasilan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keberhasilan terhadap penerapan undang-undang yang terkhusus pada Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>9</sup>Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

c. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah pengecualian, atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada para calon mempelai yang hendak menikah tetapi tidak memenuhi batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi laki-laki belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atas gugatan pada tahap paling bawah dan paling awal.<sup>11</sup> Pengadilan Agama ini berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.<sup>12</sup>

e. Studi kasus

Studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.<sup>13</sup> Dalam hal ini Studi kasus yang dimaksudkan adalah perkara dispensasi nikah pada tahun 2016-2018.

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1 ayat (2).

<sup>11</sup>H. Abdul Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 80.

<sup>12</sup>H. Abdul Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h. 83.

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 76.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas maka dirumuskan pokok masalah dalam skripsi ini yaitu “Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros kelas IB?”. Selanjutnya untuk dapat membahas secara rinci dan lebih terarah, maka pokok masalah tersebut dibagi ke dalam beberapa sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penilaian hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros?

### ***D. Kajian Pustaka***

Sebelum melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros kelas IB (studi kasus tahun 2016-2018) terdapat beberapa buku dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi dan sekaligus menjadi pedoman dalam skripsi ini, yaitu:

*Pertama*, Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, dalam buku yang berjudul “Hukum Keluarga Indonesia”, tahun 2013. Buku ini membahas tentang modernisasi hukum keluarga, termasuk batas minimal usia pernikahan. Dalam materi batas minimal usia pernikahan hanya menjelaskan mengenai batas minimal usia perkawinan menurut Islam dan menurut Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan tidak secara lengkap membahas batas minimal usia pernikahan terhadap penyimpangannya dalam hal ini adalah dispensasi nikah.

*Kedua*, Suharsil, dalam buku yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, tahun 2016. Dalam buku ini hanya menjelaskan hukum perlindungan terhadap anak dalam perkara pidana, tidak secara lengkap membahas hukum perlindungan anak terhadap perkara perdata khususnya mengenai perkara dispensasi nikah.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Hendra, dalam skripsi yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”, mahasiswa S1 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim serta kedudukan putusan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II.<sup>15</sup> Berbeda pada skripsi ini yang akan membahas tentang penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dari segi keefektivannya terhadap permohonan dispensasi nikah.

*Keempat*, Musyawir Tahir, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)”, mahasiswa S1 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Skripsi ini isinya lebih menekankan kepada faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur di Pengadilan

---

<sup>14</sup>Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, ED I (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2016).

<sup>15</sup>Hendra, *Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).



Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.<sup>16</sup> Sedangkan dalam skripsi ini membahas efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap permohonan dispensasi nikah

*Kelima*, Dr. H. Ali Imron Hs, M.Ag, dalam Jurnal yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, tahun 2011. Jurnal ini lebih memfokuskan perlindungan anak terhadap pelaku dispensasi nikah yang disebabkan karena orang tuanya.<sup>17</sup> Sedangkan dalam skripsi ini membahas keefektivan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap permohonan dispensasi nikah.

Dari beberapa literatur di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa skripsi dengan judul “Efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB (studi kasus 2016-2018) belum pernah dibahas sebelumnya karena dalam skripsi ini mengukur efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan**

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018.

---

<sup>16</sup>Musyawir Tahir, *Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)*, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

<sup>17</sup>Ali Imron Hs, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, <http://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/QISTIE/artcle/view/601> (19 September 2018).



- b. Mengetahui faktor-faktor penilaian hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah.
- c. Mengetahui penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros.

## 2. Kegunaan

- a. Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat lulus dan meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan pembaca mengenai perlindungan anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai keefektifan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan angka perkara dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak*

##### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batas kedewasaan menjadi tolak ukur seseorang masih digolongkan sebagai anak, diantaranya:

##### a. Menurut Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pada pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1):

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>1</sup>

Pasal 47 ayat (1):

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>2</sup>

Pasal 50 ayat (1):

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>3</sup>

Dari beberapa ketentuan tersebut ternyata Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab II, pasal 6-7.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab X, pasal 47.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab XI, pasal 50.

- 1) Usia syarat kawin yaitu pria usia 19 tahun dan wanita 16 tahun.
  - 2) Usia izin kawin di mana bagi mereka yang akan menikah di bawah umur 21 tahun harus ada izin dari orang tuanya.
  - 3) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.<sup>4</sup>
- b. Menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>5</sup>
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada buku I, BAB XV pasal 330 dinyatakan
- Bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.<sup>6</sup>

Melihat keanekaragaman batasan usia anak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia tidak menyinkronisasikan mengenai batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, adanya perbedaan mengenai batasan usia anak yang masih digolongkan anak. Ketidakteraturan tersebut dilatarbelakangi karena adanya perbedaan tujuan dan sasaran dari masing-masing undang-undang.

Tidak seorang pun membantah bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia yang Allah swt. berikan untuk kita jaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak,<sup>7</sup> yaitu:

---

<sup>4</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Ed I (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 15.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), *Buku I tentang Orang*, bab XV, pasal 330.

<sup>7</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ASAS, vol.6 no. 2 (Juli 2014), h. 3-4. <http://media.neliti.com> (Diakses 6 Februari 2019).

a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Kahfi/18: 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>8</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika didalamnya mempunyai anak.

b. Anak sebagai penyejuk hati

Anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak maka akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Furqan/25: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet II; Bandung: PT. Syamiil Cipta Media, 2005), h. 299.

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 366.

c. Anak sebagai ujian

Allah swt. berfirman dalam QS al-Anfal/8: 28.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.<sup>10</sup>

Anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua diuji oleh Allah swt. apakah anaknya menuju ke jalan neraka atau jalan ke surga.

d. Anak sebagai musuh orang tua

Jika orang tua keliru dan salah mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut menjadi musuh bagi orang tuanya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Taghabun/64: 14.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman beralkohol, narkoba, judi, zina. Bila

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 180.

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 557.

hal itu terjadi maka anak itu akan menjadi malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Untuk menghindari hal-hal tersebut diperlukan adanya perlindungan anak agar anak senantiasa mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>13</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>12</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Ed I (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 92.

<sup>13</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 96-97.

perlunya perlindungan anak dilakukan sedini mungkin, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.<sup>14</sup>

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral, dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak dan cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, agar anak lahir dalam keadaan sehat, cerdas, bergizi, dan terpelihara.

## 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

### a. Non diskriminasi

Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi,

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam UUPA yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan



- 3) Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.<sup>15</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan layaknya yang dimiliki oleh orang dewasa, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.<sup>16</sup> Hak anak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembahasan mengenai hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimulai dari pasal 4 sampai pasal 18. Namun dalam hal ini hanya menyebutkan beberapa hak anak, antara lain:

**a. Pasal 4:**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

**b. Pasal 9:**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**c. Pasal 10:**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

---

<sup>15</sup>Robage Gautama Simanjuntak, dkk, *Hukum Perlindungan Anak*, [http://www.academia.edu/10318128/Hukum\\_Perlindungan\\_Anak](http://www.academia.edu/10318128/Hukum_Perlindungan_Anak) (5 Desember 2018).

<sup>16</sup>Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, ED I (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

**d. Pasal 11:**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.<sup>17</sup>

Dari beberapa hak di atas perlu dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah agar anak merasa aman dan terlindungi.

Selain hak yang dimiliki oleh anak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:

**Pasal 19:**

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>18</sup>

**B. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah**

**1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan dispensasi nikah yang secara kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab III, pasal 4-11.

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, bab III, pasal 19.

perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.<sup>19</sup>

Pelaksanaan dispensasi nikah merupakan wujud dari penerapan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>20</sup>

Dispensasi nikah ini merupakan bagian dari bidang perkawinan yang secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana dalam pasal 49 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang RI No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;

---

<sup>19</sup>Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, ED I (Cet I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 144.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab II, pasal 7.

- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.<sup>21</sup>

## 2. Persyaratan Permohonan Dispensasi Nikah

Persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon.
- c. Permohonan harus memuat:
  - 1) Identitas para pihak (ayah sebagai Pemohon 1 dan ibu sebagai Pemohon 2);
  - 2) Posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan);
  - 3) Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).<sup>22</sup>

Selain ketentuan di atas, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Surat permohonan rangkap 7 (tujuh)
- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon atau para Pemohon

---

<sup>21</sup>H. Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu* (Cet II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 150.

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Agama, *No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, bab IV, pasal 13.

- c. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- d. Foto copy Surat Nikah Pemohon atau Para Pemohon
- e. Surat Penolakan dari KUA (asli)
- f. Foto copy Akta Kelahiran Anak
- g. Membayar Panjar Biaya Perkara.<sup>23</sup>

Penentuan persyaratan permohonan dispensasi nikah diatur bertujuan agar mempermudah proses para pemohon dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

### 3. Proses Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Adapun langkah-langkah pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Adalah:

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan;
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat permohonan minimal 2 (dua) rangkap;
- c. Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM);
- d. Petugas meja I menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga);
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM);

---

<sup>23</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, *Mekanisme dan Syarat Pengajuan Gugatan/Permohonan*.

- f. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan dalam surat permohonan.
- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut;
- i. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas;
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan;
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja II surat permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar (SKUM);

- l. Petugas meja II mendaftar/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
- m. Petugas meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara;
- n. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS).<sup>24</sup>

Langkah-langkah pengajuan permohonan dispensasi nikah yang telah dijelaskan secara langsung akan mempermudah para pihak yang berperkara.

---

<sup>24</sup>Ghesti Yunia Purnadewi, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dilihat Dari Segi Manfaat dan Mudharot (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta*, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum, 2016) h. 10-11.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan, dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, dan video.<sup>1</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros dengan objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Maros.

#### **B. *Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **1. Pendekatan Syar'i**

Secara syar'i berarti pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan yang dibahas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Normal.**

Secara yuridis normal berarti peneliti mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>1</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kulitatif* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.



### 3. Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti peneliti melihat kenyataan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

### C. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>2</sup> Adapun data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.
2. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>3</sup> Adapun data sekunder dari penelitian berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, data dan arsip resmi dari Pengadilan Agama Maros, serta tulisan dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap perkara dispensasi nikah.

### D. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data terhadap pelaksanaan penelitian ini terdiri atas:

1. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>4</sup> Observasi ini dilakukan bertujuan

---

<sup>2</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ED II (Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

<sup>3</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42.

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ED II (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 118.

untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan.<sup>5</sup> Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap jumlah perkara dispensasi nikah, baik dikabulkan ataupun ditolak pada tahun 2016-2018 di Pengadilan Agama Maros, serta pengamatan terhadap penilaian hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan tetap melindungi hak-hak pemohon sebagai anak.

2. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek peneliti. Hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu, atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>6</sup> Pada metode ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Maros yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros.
3. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>7</sup> Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumen yang ada di Pengadilan Agama Maros.

---

<sup>5</sup>Nasution S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, ED I (Cet VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106.

<sup>6</sup>Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 184.

<sup>7</sup>Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, h. 190.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian memiliki peranan yang penting agar tercapainya tujuan dari penelitian itu. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya.<sup>8</sup>

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah pengolahan data secara kualitatif yang telah berhasil diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, disistematisasi dan disajikan secara deskriptif agar dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

**BAB IV**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN  
EFEKTIVITASNYA TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA MAROS**

**A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros***

**1. Sejarah Pengadilan Agama Maros**

Pengadilan Agama Maros merupakan salah satu institusi pengadilan di Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Jenderal Sudirman. No 9, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama No 5 Tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958. Pengadilan Agama Maros adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang daerah hukumnya meliputi 14 kecamatan di Kabupaten Maros.

Pengadilan Agama Maros adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah berlakunya Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran Pengadilan Agama oleh undang-

undang ini diadakan jurusita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.

Adapun ketua Pengadilan Agama Maros dari tahun ke tahun, adalah sebagai berikut:

- a. K. H. Abdul Hannan, III/a, SLTA, 1963-1977
- b. K. H. Abd. Hakim, III/c, SLTA, 1977-1984
- c. K. H. Alwi Ali, III/c, SLTA, 1984-1991
- d. Drs. M. Tahir Hasan, IV/a, Sarjana (S.1), 1991-1995
- e. Drs. M. Djufri Ahmad, S.H., III/d, Sarjana (S.1), 1995-1997
- f. Drs. H. M. Kamil, S.H., IV/a, Sarjana (S.1), 1997-1999
- g. Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H., IV/a, Pasca Sarjana (S.2), 1999-2004
- h. Drs. Muh. Arief Musi, S.H., IV/a, Sarjana (S.1), 2004-2008
- i. Drs. Usman S., S.H., IV/b, Sarjana (S.1), 2008-2010
- j. Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., IV/b, Pasca Sarjana (S.2), 2010-2012
- k. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. Pasca Sarjana (S.2) 2014-2016
- l. Dr. Slamet, M.H.I., Magister (S.3) 2016-2017
- m. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., (S.2) 2017-Sekarang

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Maros

### a. Visi

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAROS YANG  
BERWIBAWA, PROFESIONAL, TERHORMAT, DAN  
DIHORMATI”.**

### b. Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- 2) Meningkatkan kinerja dan aparatur peradilan;

3) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;

4) Meningkatkan sarana dan prasarana.

### 3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros terdiri dari 14 Kecamatan di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Mandai;
- b. Kecamatan Moncongloe;
- c. Kecamatan Maros Baru;
- d. Kecamatan Marusu;
- e. Kecamatan Turikale;
- f. Kecamatan Lau;
- g. Kecamatan Bontoa;
- h. Kecamatan Bantimurung;
- i. Kecamatan Simbang;
- j. Kecamatan Tanralili;
- k. Kecamatan Tompobulu;
- l. Kecamatan Camba;
- m. Kecamatan Cenrana;
- n. Kecamatan Mallawa.

### 4. Tupoksi Pengadilan Agama Maros

Pengadilan Agama Maros sebagai institusi peradilan memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Dalam perkara kewarisan Pengadilan Agama bertugas menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan masalah harta peninggalan/harta warisan atau tirkah, menentukan bagian-bagian dari masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.



d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Sedekah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

h. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah swt.

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksadana syari'ah;
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 11) Bisnis Syari'ah.

Di samping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*Judicial Power*) adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan adalah memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan adalah mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya

agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasihat adalah memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif adalah menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

#### 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros

Struktur Pengadilan Agama Maros terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Hakim
- d. Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera

Panitera dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Wakil Panitera. Demikian pula Wakil Panitera dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Pengganti
- c. Panitera Muda Hukum

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:



### **B. Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Tahun 2016-2018**

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data dan informasi mengenai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai tahun 2018. Adapun datanya, sebagai berikut:

**Tabel 1: Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros**

Jenis Perkara	Angka Perkara Dispensasi Nikah Tiga Tahun Terakhir			
	2016	2017	2018	Jumlah
Dispensasi Nikah	30	28	40	98

**Sumber: Buku Register Perkara PA Maros Tahun 2016, 2017, 2018<sup>1</sup>**

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara pada tahun 2016 yaitu sebanyak 30 perkara, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu hanya 28 perkara, dan pada tahun 2018 perkara dispensasi kembali meningkat dengan jumlah 40 perkara. Dalam tiga tahun terakhir jumlah permohonan dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Maros Kelas IB mencapai angka 98 perkara. Hal ini menandakan bahwa permohonan dispensasi nikah dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Banyaknya permohonan dispensasi nikah ini secara langsung membuat sibuk para hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan sebuah perkara tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan orang tua dan wali pasangan muda yang hendak menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia cukup untuk menikah.

Informan Drs. Muh. Arief Musi, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Maros) mengatakan bahwa peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama ini disebabkan karena:

---

<sup>1</sup>Buku Registrasi Perkara Pengadilan Agama Maros Tahun 2016, 2017, dan 2018.

### 1. Pergaulan bebas antar remaja

Pergaulan bebas menyebabkan rusaknya moral anak bangsa. Anak merasa bebas melakukan perbuatan menyimpang karena kurangnya perhatian dari orang-orang terdekatnya. Sekarang ini, orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Sehingga anak mereka cenderung tidak lagi memperdulikan aturan-aturan agama. Orang tua juga seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti itu, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Faktor seperti ini yang seringkali menyebabkannya diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros.

### 2. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol

Perkembangan media serta penggunaannya yang tidak terkontrol sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan meskipun belum cukup umur adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Jika seperti ini, orang tua segera mengajukan

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros karena takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah.<sup>2</sup>

Kedua sebab peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di atas sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari orang tua ataupun masyarakat. Orang tua tidak boleh tinggal diam jika melihat anaknya sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dengan lawan jenisnya karena hal tersebut sudah dianggap biasa di zaman sekarang. Tapi mengingatkannya bagaimana bersikap dan berhubungan dengan lawan jenisnya sebelum adanya ikatan pernikahan, serta mendorong anak-anaknya untuk lebih semangat dalam meraih impiannya.

Meski dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2018) permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros mengalami peningkatan, akan tetapi Pengadilan Agama Maros tetap menerima perkara yang diajukan oleh pemohon dan tidak membatasinya karena diketahui bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, berarti hakim tidak boleh menolak atau memilah perkara yang akan ditanganinya karena hal demikian menjadi hak bagi para pencari keadilan dan tentu hal itu sudah kewajiban hakim untuk menerima, menimbang, mengadili, menetapkan/memutuskan perkara yang masuk.

Dalam hal semua perkara yang masuk tidak membuat hakim menetapkan bahwa perkara tersebut dikabulkan tetapi bisa saja hakim menolaknya. Hal tersebut dapat dilihat pada data laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas IB yang dimulai pada tahun 2016-2018, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Muh. Arief Musi, Hakim Pengadilan Agama Maros, pada tanggal 22 Februari 2019.



**Tabel 2: Perkara Dispensasi Nikah yang Diputus Pada Tahun 2016**

12. Jarak  
13. Waktu  
14. Biaya  
15. Jumlah  
16. Jumlah  
17. Jumlah  
18. Jumlah  
19. Jumlah  
20. Jumlah  
21. Jumlah  
22. Jumlah  
23. Jumlah  
24. Jumlah  
25. Jumlah  
26. Jumlah  
27. Jumlah  
28. Jumlah  
29. Jumlah  
30. Jumlah  
31. Jumlah  
32. Jumlah  
33. Jumlah  
34. Jumlah  
35. Jumlah  
36. Jumlah  
37. Jumlah  
38. Jumlah  
39. Jumlah  
40. Jumlah  
41. Jumlah  
42. Jumlah  
43. Jumlah  
44. Jumlah  
45. Jumlah  
46. Jumlah  
47. Jumlah  
48. Jumlah  
49. Jumlah  
50. Jumlah  
51. Jumlah  
52. Jumlah  
53. Jumlah  
54. Jumlah  
55. Jumlah  
56. Jumlah  
57. Jumlah  
58. Jumlah  
59. Jumlah  
60. Jumlah  
61. Jumlah  
62. Jumlah  
63. Jumlah  
64. Jumlah  
65. Jumlah  
66. Jumlah  
67. Jumlah  
68. Jumlah  
69. Jumlah  
70. Jumlah  
71. Jumlah  
72. Jumlah  
73. Jumlah  
74. Jumlah  
75. Jumlah  
76. Jumlah  
77. Jumlah  
78. Jumlah  
79. Jumlah  
80. Jumlah  
81. Jumlah  
82. Jumlah  
83. Jumlah  
84. Jumlah  
85. Jumlah  
86. Jumlah  
87. Jumlah  
88. Jumlah  
89. Jumlah  
90. Jumlah  
91. Jumlah  
92. Jumlah  
93. Jumlah  
94. Jumlah  
95. Jumlah  
96. Jumlah  
97. Jumlah  
98. Jumlah  
99. Jumlah  
100. Jumlah

[illegible]



**Tabel 3: Perkara Dispensasi Nikah yang Diputus Pada Tahun 2017**

[illegible][illegible]

**Tabel 4: Perkara Dispensasi Nikah yang Diputus Pada Tahun 2018**

[illegible][illegible]

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, perkara yang diterima di Pengadilan Agama Maros adalah 30 perkara, yang dikabulkan adalah 25 perkara, sedangkan yang tidak dikabulkan adalah 5 perkara. Pada tahun 2017, perkara yang diterima berjumlah 28 perkara dengan jumlah yang dikabulkan adalah 22 perkara dan perkara yang tidak dikabulkan adalah 6 perkara. Kemudian pada tahun 2018, perkara yang diterima adalah 40 perkara, yang dikabulkan 28 perkara, dan yang tidak dikabulkan adalah 12 perkara. Dengan data tersebut diketahui bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Maros mayoritas dikabulkan oleh hakim. Sedangkan permohonan yang tidak dikabulkan persentasenya kecil. Itupun terjadi hanya karena masalah administrasi dan prosedural, misalnya subjek dispensasi nikah tidak hadir.

Perkara-perkara dispensasi nikah diajukan dengan dalil-dalil alasan, seperti pada permohonan dispensasi nikah berikut:

1. Pengajuan Pada Tanggal 19 April 2106

Permohonan Dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon adalah laki-laki yang berusia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maros.

Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang berumur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang berumur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Maros;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.07.13/Pw.01/107/2016 tanggal 18 April 2016;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- e. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- f. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

## 2. Pengajuan Pada Tanggal 28 April 2018

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon adalah laki-laki berusia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal di Kabupaten Maros.

Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan berstatus perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, beragama Islam yang lahir di Maros pada tanggal 6 Oktober 2003 (umur 14 tahun 9 bulan);
- b. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2016 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki yang berstatus perjaka yang lahir tanggal 9 September 1992 (Umur 25 tahun 7 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Maros;
- c. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
- e. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.78/KUA.21.13.08/PW.00/05/2018;

- f. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia bertekad untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, meskipun saat ini anak Pemohon belum bekerja;
- g. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maros ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya segera terlaksana.

Kedua permohonan dispensasi nikah di atas merupakan sampel dari 98 data perkara dispensasi nikah yang menjelaskan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB. Semua dalil alasan yang digunakan sama seperti di atas. Meskipun dari 98 perkara terdapat anak pemohon yang telah hamil tapi pemohon tidak menuangkan dalam dalil-dalil alasannya karena hal tersebut merupakan aib pemohon. Hamilnya anak pemohon diketahui oleh hakim ketika dipersidangan.

Dalil alasan yang penting pada permohonan di atas yaitu anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu eratnya sebagai pasangan kekasih sehingga sulit untuk dipisahkan. Dengan alasan seperti itu menyebabkan orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan menjadi bahan pertimbangan pula bagi hakim dalam menetapkan suatu putusan



### ***C. Faktor-faktor Penilaian Hakim untuk Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah***

Pengadilan Agama adalah suatu institusi Peradilan yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syari'ah. Hal ini berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Dalam menjalankan wewenangnya, Pengadilan Agama bersifat pasif dalam arti bahwasannya pengadilan baru memeriksa dan mengadili apabila terdapat suatu perkara yang masuk.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama adalah dispensasi nikah. Pengajuan dispensasi nikah ini disebabkan karena orang tua ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Untuk mendapatkan dispensasi nikah tersebut, pihak pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang pengadilan.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi nikah yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan atau ditolak.

Adapun faktor penilaian hakim itu dalam hal mengabulkan dan menolak perkara adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor Penilaian Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Informan Drs. Muh. Arief Musi, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Maros) mengatakan bahwa yang menjadi faktor penilaian hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena adanya unsur darurat atau darurat perkawinan.<sup>3</sup> Selanjutnya ditambahkan oleh informan Irham Riad, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Maros) mengatakan bahwa yang menjadi ukuran adanya unsur darurat, yaitu sebagai berikut:

### a. Hamil

Hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah jika terjadinya kondisi dimana anak pemohon atau calon istri anak pemohon telah hamil. Meskipun ada hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan tentang batas umur terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَاتُ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”.

Keadaan darurat yang dimaksud jika sesampainya pada sebuah batas dimana jika tidak melakukan yang terlarang (haram). Maka akan binasa atau mendekati binasa. Kondisi inilah yang membolehkan pelanggaran larangan. Pelanggaran itu dilakukan karena menjaga lima hal pokok dalam agama Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Misalnya seseorang dibolehkan memakan bangkai kalau dalam kondisi lapar, yang seandainya

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Muh. Arief Musi., Hakim Pengadilan Agama Maros, pada tanggal 22 Februari 2019.



seseorang tersebut tidak memakannya, maka seseorang tersebut akan meninggal. Kebolehan ini hanya membuat seseorang tersebut mampu bertahan atau memakan secukupnya. Hal tersebut sama dengan ketetapan putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan anaknya hamil sebelum menikah.

Pengabulan permohonan para pemohon tiada lain hanya untuk kemaslahatan. Karena apabila permohonan para pemohon tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar. Dimana anak akan melahirkan anaknya tanpa seorang ayah dan pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.

#### b. Pergaulan anak

Informan Irham Riad, S.H.I., M.H., juga mengatakan bahwa pergaulan anak yang sudah sangat mengkhawatirkan menjadi penilaian hakim dalam memberikan penetapan.

Permohonan dengan kondisi anak pemohon seperti itu tidak serta merta hakim langsung mengabulkannya tetapi hakim mencari bukti yang membenarkan bahwa memang pergaulan anak pemohon sudah sangat mengkhawatirkan. Dan jika benar, disinilah peran hakim sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, karena jika tidak dikabulkan maka perbuatan anak tersebut akan menjadi gunjingan yang membuat anak dan orang tua merasa tertekan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Irham Riad, Hakim Pengadilan Agama Maros, pada tanggal 8 Mei 2019.

Jadi penetapan putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah tidak lain hanya memberikan status yang jelas terhadap anak yang dikandungnya, menyelamatkan anak pemohon dari perbuatan perzinahan yang akan terjadi secara terus menerus, dan mencegah ancaman gangguan dari masyarakat luas.

## 2. Faktor Penilaian Hakim untuk Menolak Permohonan Dispensasi Nikah

Perkara permohonan yang diterima Pengadilan Agama Maros tidak semua dikabulkan tetapi bisa saja permohonan itu tidak dikabulkan setelah diperiksa dan diadilli dalam persidangan.

Faktor penilaian hakim dalam hal permohonan pemohon dispensasi nikah tidak dikabulkan, yaitu karena pada permohonan pemohon dispensasi nikah setelah diperiksa tidak ditemukan adanya unsur darurat dan tidak dapat membuktikan dalil alasan permohonannya dipersidangan. Permohonan itu diajukan hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya hanya karena keinginan orang tua yang sakit.

Oleh karena itu dengan kondisi seperti di atas, Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah.

### ***D. Penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros***

Sebelum membahas penerapan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap dispensasi nikah, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros, sebagai berikut:

#### 1. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2016/PA.Mrs

Pemohon umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maros. Berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 April 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 39/Pdt.P/2016/PA Mrs.. tanggal 19 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu seorang perempuan yang berumur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang berumur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Maros;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.13/Pw.01/107/2016 tanggal 18 April 2016;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- e. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- f. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Agama Maros untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.

Hakim Pengadilan Agama memberikan pertimbangan hukum, yaitu:

Menimbang, bahwa jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak

melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur yang menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu antara anak Pemohon dan calon suaminya juga

tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 16 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah Baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun 5 bulan telah mengalami menstruasi, sehingga walupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi nikah/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan kedua saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan lelaki (calon suaminya) tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak

Menimbang bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat dimana Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu “*sirri*” yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah swt. dalam QS an-Nur/24: 32, yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari, yaitu:

<sup>5</sup>Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 39/Pdt.P/2016/PA.Mrs, Pengadilan Agama Maros, Pada tanggal 25 Februari 2019.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, h. 354.



حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dinikahkan dengan kekasihnya.

## 2. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs

Pemohon umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Maros. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi, *al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz VII (Cet. I; t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 3.



- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu seorang perempuan yang berumur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang berumur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Maros;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.73/KUA.21.13.02/PW.00/3/2017, tertanggal 20 Maret 2017;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- e. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

- f. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Agama Maros untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.

Hakim Pengadilan Agama memberikan pertimbangan hukum, yaitu:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita’.

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 15 tahun 10 bulan, telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur anak Pemohon baru 15 tahun 10 bulan

sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 1954.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.

Menimbang bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 10 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan terus-penerus, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs, Pengadilan Agama Maros, Pada tanggal 25 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah swt. dalam QS an-Nur/24: 32, yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”<sup>9</sup>.

- b. Hadits Riwayat Bukhari, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَقْمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, h. 354.

kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.<sup>10</sup>

c. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dinikahkan dengan kekasihnya.

### 3. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Mrs

Pemohon bertempat tanggal lahir Maros 1 juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Maros. Berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2018/PA Mrs.. tanggal 2 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah mempunyai anak laki-laki, lahir di Maros pada tanggal 17 November 2000 (umur 17 tahun 9 bulan), beragama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Maros;
- b. Bahwa anak Pemohon sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan, beragama Islam pendidikan SD, yang lahir di Maros tanggal 8 Juni 1999 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Kabupaten Maros;

---

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, h. 3.

- c. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan.
- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan, dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sangatlah patut diikat dalam pernikahan yang resmi;
- e. Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-92/KUA.21.13.07/PW.001/10/2018, tertanggal 2 Oktober 2018;
- f. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia betekad untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak pemohon telah bekerja sebagai (tenaga honorer dinas kebersihan Maros);
- g. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istri, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai

umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maros ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Agama Maros untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.

Hakim Pengadilan Agama memberikan pertimbangan hukum, yaitu:

Menimbang, bahwa jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua.

Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur yang menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

Menimbang, bahwa Undang-undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan



berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria telah memenuhi kategori dewasa secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun namun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.<sup>11</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah swt. dalam QS an-Nur/24: 32, yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ ۗ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

---

<sup>11</sup>Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 100/Pdt.P/2018/PA.Mrs, Pengadilan Agama Maros, Pada tanggal 25 Februari 2019.

memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.<sup>12</sup>

b. Hadits Riwayat Bukhari, yang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.<sup>13</sup>

c. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354.

<sup>13</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, h. 3.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dinikahkan dengan kekasihnya.

Berdasarkan beberapa uraian putusan perkara dispensasi nikah di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan terhadap perkara dispensasi nikah. Dimana hakim memeriksa dan mengadili maksud pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros, karena jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tiada lain hanya untuk melindungi anak pemohon dari perlakuan pemohon yang hanya untuk mencari keuntungan dari pengajuan dispensasi nikah tersebut. Misalnya eksploitasi seksual terhadap anak.

Kemudian dalam hal mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah, hakim tidak serta merta mengabulkannya. Permohonan dispensasi nikah dikabulkan jika permohonan pemohon dispensasi nikah mengandung unsur darurat atau darurat perkawinan. Darurat perkawinan yaitu telah hamil atau karena pergaulan bebas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan Irham Riad, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Maros) bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah karena adanya unsur darurat, misalnya telah hamil. Maka kondisi seperti itu, hakim mengabulkan permohonannya dengan

pertimbangan kemaslahatan. Mengabulkan berarti menyelamatkan dan melindungi anak tersebut dari perlakuan diskriminasi dilingkungan sekitarnya”.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, tindakan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah adalah tindakan memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti. Akibat yang sudah pasti adalah bagi ibu dan bayi yang dikandungnya dan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Ibu si bayi harus dijaga stabilitas mentalnya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin dan bayi yang tidak berdosa itu harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Sedangkan akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan usia anak itu baik atau tidak. Antara mengabulkan atau tidak mengabulkan, dua-duanya memang beresiko, tetapi Pengadilan Agama harus memilih resiko yang lebih kecil.

Pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan unsur darurat memang melindungi anak dari pada tidak mengabulkannya. Dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Anak lebih berperan karena dapat melindungi anak dari perlakuan diskriminasi orang-orang sekitarnya yang bisa mengakibatkan psikologis anak terganggu. Meskipun hak anak yang lain tidak lagi didapatkan, seperti anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya karena sudah sibuk mengurus suami ataupun anaknya sehingga cita-cita yang dahulu diimpikannya tidak tercapai.

Oleh karena itu, Selain permohonan yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dengan menolak permohonan pemohon dispensasi nikah demi kemaslahatan sang anak untuk kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Informan Irham Riad, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Irham Riad, Hakim Pengadilan Agama Maros, pada tanggal 8 Mei 2019.

Maros), bahwa Pengadilan Agama menyambut dengan baik upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Dimana hanya mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah jika benar-benar adanya unsur darurat.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros belum efektif karena bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah hanya sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi sedangkan hak-hak yang lainnya dikesampingkan. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, dan anak akan kehilangan kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat, dan memanfaatkan waktu luang.

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Irham Riad, Hakim Pengadilan Agama Maros, pada tanggal 8 Mei 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2016 yaitu 30 perkara, kemudian pada tahun 2017 perkara permohonan dispensasi nikah mengalami penurunan yaitu 28 perkara, dan pada tahun 2018 perkara permohonan dispensasi nikah kembali meningkat dengan jumlah 40 perkara. Dalam tiga tahun terakhir jumlah permohonan dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Maros Kelas IB mencapai angka 98 perkara. Hal ini menandakan bahwa permohonan dispensasi nikah dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama ini disebabkan karena pergaulan bebas antar remaja dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.
2. Faktor penilaian hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena adanya unsur darurat. Adapun yang menjadi ukuran bahwa adanya unsur darurat yaitu karena telah hamil dan karena pergaulan anak. Sedangkan faktor penilaian hakim dalam hal permohonan pemohon dispensasi nikah tidak dikabulkan, yaitu karena pada permohonan pemohon dispensasi nikah setelah diperiksa tidak ditemukan adanya unsur darurat. Permohonan itu diajukan hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya hanya karena keinginan orang tua yang sakit. Oleh karena itu dengan kondisi seperti di atas, Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah.
3. Penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros belum

efektif karena bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah hanya sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi sedangkan hak-hak yang lainnya dikesampingkan. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, dan anak akan kehilangan kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat, dan memanfaatkan waktu luang.

### **B. Implikasi**

1. Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam meminimalisir jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, khususnya orang tua agar sering mengingatkan anak tentang ajaran agama dan mengawasinya dalam segala hal, baik lingkungan pergaulan sang anak maupun dalam penggunaan media sosialnya agar anak tersebut tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan anak tersebut hamil dahulu sebelum menikah.
2. Pengabulan permohonan dispensasi nikah karena adanya unsur darurat, perlu pemeriksaan lebih lanjut yang membuktikan bahwa benar adanya unsur darurat pada permohonan pemohon dispensasi nikah dengan memperketat dalam pemeriksaan saksi dan membawa bukti bahwa benar anak pemohon telah hamil, karena jangan sampai terjadinya kebohongan atau manipulasi yang dilakukan agar permohonan pemohon dapat dikabulkan.
3. Diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk dapat menciptakan kesadaran hukum sehingga masyarakat taat dan patuh pada aturan-aturan khususnya mengenai dispensasi nikah dalam kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Dar Tuq al-Najah. 1422 H.

Buku Laporan Perkara Tahuna PA Maros, Tahun 2016, 2017, dan 2018.

Buku Registrasi Perkara Pengadilan Agama Maros Tahun 2016, 2017, dan 2018.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.

Chanda, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2014.

Hasil wawancara dengan Irham Riad. Hakim Pengadilan Agama Maros. pada tanggal 8 Mei 2019.

Hasil wawancara dengan Muh. Arief Musi. Hakim Pengadilan Agama Maros. pada tanggal 22 Februari 2019.

Hendra. *Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

H. Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.

Imron Hs, Ali. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. <http://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/601>. (19 September 2018).

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Khasanah, Ngiyanatul. *Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamiil Cipta Media, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). *Buku I tentang Orang*.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Nasution S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.



- Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. *Mekanisme dan Syarat Pengajuan Gugatan/Pemohon*.
- Peraturan Menteri Agama. *No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*
- Purnadewi, Ghesti Yunia. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dilihat Dari Segi Manfaat dan Mudharot (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta*. Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum). 2016
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 39/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Pengadilan Agama Maros. Pada tanggal 25 Februari 2019.
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 16/Pdt.P/2017/PA.Mrs. Pengadilan Agama Maros. Pada tanggal 25 Februari 2019.
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 100/Pdt.P/2018/PA.Mrs. Pengadilan Agama Maros. Pada tanggal 25 Februari 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Simanjuntak, Robage Gautama, dkk. *Hukum Perlindungan Anak* [http://www.academia.edu/10318128/Hukum\\_Perlindungan\\_Anak](http://www.academia.edu/10318128/Hukum_Perlindungan_Anak), (5 Desember 2018).
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kulitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Tahir, Musyawir. *Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Talli, H. Abdul Halim. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Website Pengadilan Agama Maros. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Maros". <http://sipp.pa-maros.go.id> (25 Juni 2018).
- Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. ASAS. vol.6 no. 2 (Juli 2014). <http://media.neliti.com> (Diakses 6 Februari 2019).

## LAMPIRAN



Keterangan: wawancara dengan Drs. Muh. Arief Musi, S.H (Hakim Pengadilan Agama Maros) pada tanggal 22 Februari 2019 di ruangan Hakim Pengadilan Agama Maros



Keterangan: wawancara dengan Irham Riad, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Maros) pada tanggal 8 Mei 2019 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Maros



Keterangan: foto bersama dengan Irham Riad, S.H.I, M.H., (Hakim Pengadilan Agama setelah melakukan wawancara

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar Pertanyaan Wawancara dalam Skripsi: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B.

---

Objek Penelitian :

Hari/Tanggal :

1. Bagaimana perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penilaian hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan tetap melindungi hak-hak pemohon sebagai anak?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros kelas I B?

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFORMAN**

**NAMA :**

**TEMPAT TANGGAL LAHIR :**

**PEKERJAAN :**

1. Siapakah nama asli Bapak/Ibu hakim?
2. Bagaimana perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018?
3. Apakah alasan-alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?
4. Apakah yang menjadi faktor-faktor penilaian Bapak/Ibu hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah?
5. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu hakim tentang efektivitas dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah?
6. Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diterapkan sebagaimana mestinya di dalam persidangan?
7. Adakah peran Bapak/Ibu hakim dalam mengurangi jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan?

Nomor : B- ~~770~~/SH.01/PP.00.9/02/2019  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Samata Gowa, Februari 2019

Kepada Yth  
Ketua Pengadilan Agama Maros  
di  
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Fitriani. HS
N I M	: 10100115126
Semester	: VIII ( Delapan)
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Alamat	: Asrama Rusunawa UIn Alauddin Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :


**"Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Klas I B (Studi Kasus 2016-2018)."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Supardin, M.H.I.  
2. Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Pengadilan Agama maros** terhitung mulai tanggal 18 Februari 2019 Sampai 18 Maret 2019

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih

Wassalam  
Dekan



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa ( sebagai Laporan)





## PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB

Jalan Jend. Sudirman No. 9 Telp. (Fax) 0411-371137  
website : <http://www.pa-maros.go.id>, e-mail : [admin@pa-maros.go.id](mailto:admin@pa-maros.go.id)  
**MAROS 90511**

### SURAT KETERANGAN

No. : W20.A5/ 222/TL.00/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.  
NIP : 19630317 199203 2 002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Ketua  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Maros Kelas Ib

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fitriani. HS  
No. Stambuk : 10100115126  
Program Studi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Judul Skripsi : " Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Klas IB (Studi Kasus 2016-2018)  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Maros Tanggal 18 Februari s/d 08 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 08 Mei 2019  
Ketua  
  
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.  
NIP. 19630317 199203 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul, "EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B.", yang disusun oleh Fitriani. HS, NIM: 10100115126, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar Proposal).

Makassar, 3 Januari 2019 M  
26 Rabiul Akhir 1440 H

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.



(.....)

Pembimbing II : Dr. Hj. Hartini Tahir, M.H.I



(.....)

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003



## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB (Studi Kasus tahun 2016-2018)" yang disusun oleh Fitriani, HS, NIM: 10100115126, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 20 Mei 2019 M

15 Ramadhan 1440 H

Penguji I : Dr. Fatmawati H~~il~~al, M.Ag.

Penguji II : Dr. Rahma Amir, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini, M.H.I.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi

(.....)

Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP.196503021994031003

## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

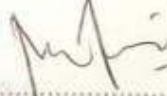
Skripsi yang berjudul, "EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB (STUDI KASUS TAHUN 2016-2018)", yang disusun oleh Fitriani. Hs NIM: 10100115126 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, bertepatan dengan 21 Syawal 1440 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, dan disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Makassar, 08 Juli 2019 M  
05 zulqa'dah 1440 H

Penguji I : Dr. Fatmawati, M.Ag.

()

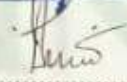
Penguji II : Dr. Rahma Amir, M.Ag.

()

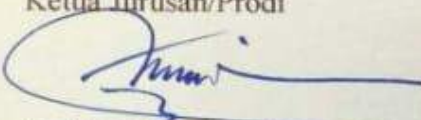
Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

()

Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I

()

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi

()

Dr. H. Supardin, M.H.I.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**FITRIANI. HS**, lahir pada tanggal 01 Februari 1997 di Ujung Pandang yang sekarang dikenal dengan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan H. Safir dan Hj. Jahida. Peneliti mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 11/32 Pulau Balang Caddi pada tahun 2004-2009. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Mts dan MA Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum selama 6 tahun, di Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2015. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Peradilan Agama.

Selama menyandang status mahasiswa di Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, penulis sempat menjadi anggota pada organisasi Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS), dan anggota pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Gowa.

